

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pertama berfokus pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan perbankan BUMN go public yang terdaftar di bursa efek Indonesia atau disebut BEI. Praktik *Good Corporate Governance* dapat memperlemah, memperkuat atau sebaliknya dari pengaruh pengungkapan *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan pada perbankan BUMN go public yang telah terdaftar di BEI (Puspitasari & Ermayanti, 2019).

Penelitian kedua ini berfokus pada mengetahui seberapa jauh pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Profitabilitas* dan *Leverage* dapat mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Data - data tersebut diambil dari perusahaan perbankan yang telah terdaftar di dalam bursa efek Indonesia pada periode 2013 - 2015. Hasil dari uji secara simultan atau uji F yaitu $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($18,631 > 2,6946$) dengan signifikansi 0,000 mempunyai arti dengan tingkat kesalahan 5% dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel bebas (GCG, *Profitabilitas* dan *Leverage*) secara bersama-sama dapat mempengaruhi secara signifikan variabel terikat yaitu nilai perusahaan. Hasil uji T menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG) mempengaruhi variabel nilai perusahaan. Pada variabel *Profitabilitas* mempengaruhi variabel nilai perusahaan secara positif signifikan dan untuk variabel *leverage* berpengaruh negatif terhadap variabel nilai perusahaan secara signifikan (Damaianti, 2020).

Penelitian ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh *good corporate governance* atau GCG terhadap nilai perusahaan, pengaruh kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan, mengetahui dan menjelaskan pengaruh *good corporate governance* (GCG), serta kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. penelitian ini didasarkan pada analisis secara parsial

dan diperoleh hasil yaitu berupa *good corporate governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan hasil dari analisis simultan diperoleh hasil bahwa *good corporate governance* dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Nofitasari, 2015).

Pada penelitian keempat ini, berfokus pada deskriptif, dan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan review yang telah dilakukan terhadap dokumen yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan pemeringkatan *good corporate governance* oleh IICG untuk setiap emiten yang menjadi responden, serta publikasi - publikasi lainnya yang relevan. Data dianalisis dan hipotesis diuji dengan menggunakan alat uji korelasi Kendall's τ pada taraf nyata 5%. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tingkat nilai perusahaan tidak ditentukan oleh *good corporate governance*, dimana pemangku kepentingan eksternal di pasar modal yang dimaksud tidak memanfaatkan informasi berkenaan dengan *good corporate governance* sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan jangka pendek yang terkait investasi (Tjahjono & Chaeriyah, 2017).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori yang memberikan gambaran dimana sinyal atau isyarat merupakan suatu tindakan yang harus diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagaimana cara pandang perusahaan bagi investor. bukan hanya itu, teori sinyal ini juga dapat mengungkapkan bahwa investor dapat membedakan antara perusahaan - perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan perusahaan yang memiliki nilai rendah (Brigham & Houston Joel F, 2001). teori signal juga berbicara tentang para manajer yang menggunakan akun - akun dalam laporan keuangan sebagai tanda atau signal harapan dan tujuan masa depan (Godfrey-Smith, 2006).

Suatu Perusahaan pasti mendorong tuntutan yang mana harus memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal dengan adanya teori sinyal. Teori Sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan dapat diterima oleh para pengguna laporan keuangan yang masing - masing pihak tidak sama. Hal tersebut

dapat terjadi karena adanya asimetri informasi tersebut. Setiap informasi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi dari para investor. Kualitas informasi dalam laporan keuangan dapat dinilai dalam berbagai sudut pandang, yaitu keakuratan, relevan, kelengkapan informasi dan ketepatan waktu (Gumanti, 2009).

Teori sinyal yang sudah dikembangkan menyatakan bahwa pihak yang memiliki informasi terkait dengan laporan keuangan perusahaan (pihak manajer), memiliki keinginan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para calon investor dengan tujuan untuk meningkatnya harga saham perusahaan (Ross, 1977). Secara umum, manajer perusahaan terdorong untuk secepat mungkin menyampaikan informasi-informasi yang baik kepada publik. Ketika sinyal yang diberikan pihak manajer perusahaan dapat meyakinkan investor, maka publik akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga harga saham sekuritas akan bereaksi (Brigham & Hauston Joel F, (2001:36)).

Perusahaan yang baik pastinya akan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan serta akan mempublikasikan pengungkapan secara sukarela. Suatu informasi yang disajikan sebagai suatu pengumuman akan dianggap sebagai sinyal untuk investor dalam pengambilan keputusan investasi apakah akan melakukan investasi terhadap perusahaan tersebut atau tidak. Apabila informasi tersebut positif, maka pasar akan bereaksi terhadap pengumuman tersebut sehingga terjadi perubahan dalam pasar yang berkaitan volume pada perdagangan saham (Sartono, 2001).

Apabila manajer tersebut yakin bahwa perusahaan memiliki harapan yang baik dan menginginkan harga saham perusahaan di pasar modal meningkat, maka pihak manajer harus menginformasikan hal tersebut kepada investor. Teori sinyal dapat menunjukkan bagaimana perusahaan memberikan sinyal kepada para investor, sehingga disini investor dapat menilai apakah perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik atau buruk di waktu kedepannya. Agar investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut, maka perusahaan harus memberikan kabar baik kepada para pemegang saham. Kabar baik tersebut diantaranya adalah informasi mengenai kinerja perusahaan seperti informasi laba yang

diperoleh perusahaan, peningkatan harga saham perusahaan di pasar modal, pembagian dividen oleh perusahaan dan lain - lainnya. Selanjutnya kabar baik terkait informasi dengan perusahaan yakni laporan keuangan tahunan perusahaan. Informasi – informasi yang ada didalam laporan keuangan tahunan perusahaan diantaranya adalah kebijakan manajemen perusahaan, keuangan perusahaan dan lain - lainnya. Investor membutuhkan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum melakukan investasi (Umi Mardiyati, Gatot Nazir Ahmad, 2012).

2.2.2 *Good Corporate Governance*

Berawal dari usulan untuk penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek a Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia atau lebih dikenal dengan BEI) yang mengatur tentang peraturan - peraturan bagi emiten yang tercatat didalam BEI yang mewajibkan untuk mengangkat seorang atau beberapa komisaris independent dan membentuk anggota - anggota komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) sendiri mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia termasuk pada perusahaan perbankan (Andika & Rahman, 2018).

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur dimana para perilaku pemilik perusahaan seperti direktur, manajer, perincian, penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada para investor (para pemegang saham dan para kreditor).

Corporate Governance atau CG merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (lebih tepatnya pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan dan para pemegang kepentingan intern serta ekstern lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka yang dengan kata lain disebut sistem yang dapat mengatur juga mengendalikan perusahaan (Sayidah, 2007).

“ Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, karyawan, pihak kreditor, pemerintah, dan para pemegang kepentingan internal juga eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban

mereka. Karena itu dengan kata lain GCG ialah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan ” Menurut (Ilonga, 2015).

Pengertian GCG lainnya adalah suatu sistem atau prinsip pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama dimana dalam mengelola risiko yang signifikan dalam memenuhi tujuan pada bisnisnya melalui pengamanan pada aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang, Tentu saja hal ini dimaksudkan dalam pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, serta pihak - pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. menurut Muh. Effendi dalam buku *The Power of Good Corporate Governance* (Cadbury Committee dalam Budiharta dan Gusnadi (2008)).

Good corporate governance (GCG) juga bisa disebut seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas good corporate governance atau GCG ini menunjukkan peningkatan pada penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas good corporate governance atau GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2014).

Berdasarkan argumen yang telah dikembangkan oleh *corporate governance* dipandang mempunyai dua dimensi besar Pertama *monitoring* terhadap kinerja manajemen dan meyakinkan bahwa akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham yang menekankan pertanggungjawaban, serta dimensi akuntabilitas dari *corporate governance*. Kedua, struktur, mekanisme dan proses *governance* yang dapat memotivasi perilaku manajerial untuk meningkatkan kemakmuran bisnis dan perusahaan. Kedua perspektif tersebut perlu dilakukan pertimbangan ketika ada usaha untuk menciptakan struktur dan prosedur *governance* yang mengarah pada perbaikan kinerja. Dari berbagai definisi yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan (Hisamuddin & Tirta K, 2015):

- a. Struktur - struktur yang mengatur pola hubungan harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, manajer dan para stakeholder lainnya. Dimana dalam proses – prosesnya dilakukan secara transparan.
- b. Sistem Check and balance yang mencakup perimbangan kewenangan dalam pengendalian perusahaan dimana membatasi dua peluang, peluang yang pertama yaitu pengelolaan yang salah, dan peluang yang kedua yaitu penyalahgunaan aset perusahaan.

2.2.3 prinsip *Good Corporate Governance*

a. Transparansi (*transparency*)

Transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI pada tahun 2009 adalah perilaku keterbukaan dalam mengemukakan informasi – informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan. konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang harus tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan (Oecd, 2004). Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan mengutus auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan (Kirkpatrick, 2005).

Prinsip – prinsip dalam transparansi ini meliputi pengungkapan informasi yang bersifat penting, informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, serta penyebaran informasi harus bersifat adil, dan yang paling penting yaitu tepat waktu dan efisien. Sehingga para pengelola perbankan tanpa terkecuali perbankan Syariah dan konvensional juga harus meletakkan tanggung jawab yang sebesar - besarnya terhadap keselamatan dana yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada mereka.

b. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI tahun 2009, pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan yang dilakukan oleh bank dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan bank yang sehat. Responsibilitas adalah adanya sebuah tanggung jawab pengurus dalam manajemen perusahaan, pengawasan manajemen perusahaan serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip – prinsip ini tercermin pada *corporate governance* harus memberikan pengakuan pada hak - hak *stakeholders*, seperti yang telah ditentukan didalam undang - undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *stakeholders*, Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan adanya lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Prinsip – prinsip dalam pertanggung jawaban ialah, menjamin hak pihak - pihak berkepentingan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak - hak mereka agar terpenuhi, dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan jika perlu, para pihak yang berkepentingan juga harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan (Widyaningsih, 2017).

c. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI pada tahun 2009, pengertian dari akuntabilitas itu sendiri adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. prinsip ini dapat dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari organisme perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif. Konsep *corporate governance* harus menjamin adanya pedoman strategis pada perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen perusahaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, dan akuntabilitasnya terhadap perusahaan dan pemegang saham dan anggota direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan pemegang saham (Oecd, 2004).

Prinsip – prinsip akuntabilitas itu sendiri meliputi pengertian bahwa anggota Dewan Direksi harus bisa bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, dan penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, serta adanya akses terhadap informasi yang relevan, akurat dan tentunya harus tepat waktu (Malikah, 2011).

Dalam prakteknya perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah

d. Profesional (*professional*)

Profesional menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI pada tahun 2009, profesional itu sendiri adalah suatu sifat memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh / tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank.

Prinsip ini menekankan agar dalam pengelolaan perbankan sebaiknya dikelola secara profesional tanpa adanya tekanan - tekanan juga pengaruh dari pihak lain sehingga *conflict of interest* dapat dihindari sejauh mungkin. Conflict of Interest terjadi diantara dua pihak yaitu principal dan agen. Principal ialah orang yang memberikan suatu mandat atau pertanggungjawaban kepada agen. Hubungan principal dan agen sering terjadi antara manajer dengan bawahan atau juga bisa antara dewan komisaris dengan jajaran direksi. Intinya, Conflict of Interest akan muncul ketika agen dengan principal sudah memiliki kepentingan yang berbeda. Namun secara umum, Conflict of Interest dapat menyebabkan karyawan bertindak di luar kepentingan dan tujuan suatu perusahaan sehingga dapat merugikan perusahaan. Ketika muncul Conflict of Interest maka itu pertanda berita buruk bagi reputasi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, bebas dari kepentingan yang hanya menguntungkan beberapa pihak namun lebih cenderung merugikan banyak hal yang

terutama yang berpotensi merugikan *stakeholders* dan mampu mengambil keputusan secara objektif. Penerapan prinsip independensi dapat dilakukan dengan cara (Desiana, 2016) :

- 1) Dilakukan penunjukan komisaris independen dan komite audit.
- 2) Melakukan pengambilan keputusan manajemen yang objektif.
- 3) Menerapkan sistem pengendalian intern yang sehat.
- 4) Menjalankan penerapan fungsi manajemen resiko.

2.2.4 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan perhitungan investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan, dalam hal ini sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar lebih percaya atau tidak pada kinerja perusahaan saat ini dan juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang. Selain itu nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran secara maksimum kepada para pemegang sahamnya apabila harga saham perusahaan mengalami peningkatan. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi harga saham berbanding lurus dengan tinggi kemakmuran pemegang saham (Nurhasanah, 2017).

Sedangkan nilai (*Value*) perusahaan yang telah *go public* yaitu nilai yang tercermin pada harga pasar saham perusahaan, namun, nilai perusahaan yang belum *go public* nilainya akan terealisasi apabila perusahaan tersebut akan dijual (Margaretha & Afriyanti, 2017).

Dalam beberapa penelitian terdahulu ada yang sebagian menggunakan Tobin's Q dan sebagian lagi menggunakan PBV. Perbedaan Tobin's Q dan PBV itu sendiri yaitu :

1. Tobin's Q

Tobin's Q ditemukan seorang pemenang hadiah nobel dari Amerika Serikat yang bernama James Tobin. Tobin's Q ialah nilai pasar dari aset perusahaan yang menggunakan biaya pengganti dalam konsepnya dimana rasio lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku. rasio lebih berfokus terhadap berapa nilai perusahaan saat ini, yang dapat diartikan sebagai berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini.

Keunggulan Tobin's Q (Harney & Tower, 2003):

- a. Jika menggunakan Tobin's Q dapat mencerminkan aset perusahaan secara keseluruhan,

- b. Tobin's Q dapat mencerminkan sentimen pasar, seperti analisis dilihat dari prospek perusahaan atau spekulasi,
- c. Tobin's Q juga dapat mencerminkan modal intelektual perusahaan,
- d. Tobin's Q sendiri dapat mengatasi masalah dalam memperkirakan tingkat keuntungan perusahaan atau biaya marjinal.

Namun dalam praktiknya, rasio Q atau Tobin's Q sulit untuk dihitung dengan akurat karena memperkirakan biaya penggantian atas aset sebuah perusahaan bukan pekerjaan yang mudah (Margaretha & Afriyanti, 2017). Dalam hal lainnya juga Tobin's Q dapat menyesatkan dalam pengukuran kekuatan pasar karena sulitnya memperkirakan biaya pergantian, pengeluaran untuk iklan dan penelitian serta pengembangan pada aset tidak berwujud. Tobin's Q itu sendiri didasarkan pada pandangan bahwa nilai pasar modal merupakan nilai keseluruhan modal terpasang dan insentif yang diinvestasikan. Penelitian terbaru tentang kesalahan pengukuran menunjukkan bahwa ukuran q mungkin tidak dihitung dengan benar jika ada "gelembung" pada penilaian pasar modal yang terus menerus dari waktu ke waktu dan juga berhubungan dengan nilai fundamental. Walaupun Tobin's Q biasanya berkorelasi dengan investasi dalam studi empiris, peneliti menemukan bahwa hubungan ini kadang-kadang lemah dan sering didominasi oleh pengaruh langsung aliran kas pada investasi. Namun Tobin's Q atau Q ratio merupakan suatu model yang berguna dalam pembuatan keputusan investasi (Ellen & Juniarti, 2013).

Tobin's Q meringkas informasi yang akan datang yang relevan dengan keputusan investasi perusahaan. Perusahaan meningkatkan modal saham jika Q tinggi karena jika nilai Tobin's Q di atas satu maka perusahaan akan menghasilkan rate of return yang lebih tinggi, dibandingkan dengan yang sudah dikeluarkan oleh biaya aktiva (Ellen & Juniarti, 2013).

2. *Price to Book Value (PBV)*

Dalam analisis kondisi perusahaan, Komponen penting lainnya yang harus diperhatikan adalah *Price to Book Value (PBV)*. *Price to Book Value (PBV)* merupakan variable yang dapat menentukan saham mana yang akan dibeli. Untuk perusahaan -

perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, dalam hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Oleh karena itu, semakin besar rasio *Price to Book Value* (PBV) maka semakin tinggi perusahaan yang dinilai oleh para pemodal relatif, berbeda dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Dalam *Price to book value* (PBV) yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan kedepannya. nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang saham juga tinggi.

Ada beberapa keunggulan dari *Price to Book Value* (PBV), yang pertama dalam nilai buku merupakan ukuran yang stabil dan sederhana untuk dibandingkan dengan harga pasar. Keunggulan kedua adalah *Price to Book Value* (PBV) dapat dibandingkan antar perusahaan sejenis yang menunjukkan tanda saham tersebut termasuk saham yang mahal atau murah. Yang kedua, dapat gambaran akan potensi pergerakan harga suatu saham, oleh karena itu, dari gambaran tersebut secara tidak langsung *price to book value* (PBV) ini juga memberikan pengaruh terhadap harga saham. Dalam *price to book value* (PBV) selain kelebihan ada juga beberapa kekurangannya. yang pertama, nilai buku sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dan setiap perusahaan memiliki kebijakannya sendiri - sendiri. Hal ini mengakibatkan rasio *price to book value* tidak dapat diperbandingkan jika perusahaan yang dibandingkan ternyata kebijakannya berbeda. yang kedua nilai buku, mungkin tidak banyak berarti untuk perusahaan yang telah berbasis teknologi dan jasa karena dalam perusahaan tersebut tidak memiliki aset nyata yang signifikan. Yang ketiga, nilai buku dari ekuitas akan menjadi negatif jika selalu mengalami *earnings* yang negative, *earnings* itu mengakibatkan nilai rasio *price to book value* juga negative (Murhadi, 2013).

Dari penjelasan indikator - indikator diatas, maka diambil keputusan bahwa dalam penelitian ini penulis memilih *Price to Book Value* (PBV) sebagai indikator nilai perusahaan karena nilai perusahaan sendiri banyak digunakan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi.

2.2.5 Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain yaitu kredit atau dalam bentuk lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup banyak masyarakat. Sementara itu ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat lalu menyalurkan dana tersebut kembali dengan memberikan jasa perbankan lainnya (Kasmir, 2014). Fungsi bank secara umum ialah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau fungsi *financial intermediary* (Jahja, 2012). Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 pada Tahun 1992. namun, fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat. Menurut Pasal 4 Undang - Undang No. 7 pada Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan dari pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi yang lebih ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbankan memiliki 3 kegiatan utama (Kasmir, 2014), yaitu :

- a Menghimpun dana.
- b Menyalurkan dana.
- c Memberikan jasa bank lainnya.

Menghimpun dana ialah kegiatan mengumpulkan dan mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat, bentuk yang dibeli berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Menyalurkan dana ialah melempar kembali dana yang didapat dari masyarakat melalui giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk lain yaitu pinjaman kredit (konvensional) atau pembiayaan (syariah).

Memberikan jasa lainnya ialah bank memberikan layanan jasa sebagai pendukung kegiatan perbankan contohnya jasa pembayaran, jasa setoran, jasa pengiriman uang, jasa

kartu kredit, dll. Dari segi menentukan harga, bank dapat dibedakan menjadi dua (Kasmir, 2014) :

1. Bank umum konvensional, Dalam memperoleh keuntungan dan menentukan harga pada nasabah bank dengan prinsip konvensional, terdapat 2 metode, antara lain:
 - a Menetapkan bunga, dalam perbankan bunga digunakan sebagai harga jual dan harga beli yang sering disebut *spread based*.
 - b Menetapkan harga tertentu untuk jasa - jasa yang diberikan.
2. Bank umum Syariah, Penentuan yang dilakukan bank dengan prinsip syariah tentunya berbeda dengan bank yang menggunakan prinsip konvensional. Bank dengan prinsip syariah menerapkan aturan berdasarkan hukum islam dalam menjalankan kegiatan perbankan. Oleh karena itu dalam penentuan harga dan pencarian keuntungan bank umum syariah dilakukan dengan cara :
 - a Pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah)
 - b Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
 - c Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan namun tentunya masih dalam syariat islam (murabahah)
 - d Pembiayaan barang modal yang berdasarkan sewa murni (ijarah)
 - e Pembiayaan dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa sari bank kepada pihak lain (ijarah wa iqtina).

2.3 Hipotesis

Tata kelola perusahaan adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan. Sistem tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penentuan sasaran usaha maupun dalam upaya mencapai sasaran. Tata kelola perusahaan juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal. Begitu pula dalam analisis dan pengendalian resiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan. Tata kelola korporasi yang tidak sehat dapat menimbulkan godaan yang mengakibatkan

terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti konflik kepentingan antara manajer (sering juga disebut *agent*) dengan pemegang saham (pemilik) yaitu manajer melakukan kecurangan dengan melakukan manajemen laba untuk kepentingan diri sendiri padahal hal tersebut menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Manajemen perusahaan yang lemah, ditambah etika bisnis yang buruk, dan juga moral manajemen kurang baik juga dapat merugikan stakeholders, terutama para pemegang saham, kreditur, dan karyawan. Oleh karena itu, dengan diterapkannya prinsip - prinsip *corporate governance* yaitu prinsip keterbukaan, prinsip akuntabilitas, prinsip kewajaran, prinsip pertanggungjawaban, dan prinsip independensi di dalam perusahaan maka diyakini *corporate governance* dapat mengatasi dan meminimalkan adanya berbagai macam konflik kepentingan, dalam hal ini akan membuat kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih optimal dan pastinya akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu perusahaan yang melaksanakan praktik *corporate governance* yang baik akan memberikan feedback laporan keuangan yang berkualitas kepada investor sehingga kredibilitas laporan keuangan tersebut meningkat. Jika dalam kredibilitas laporan keuangan yang meningkat maka akan meningkatkan kepercayaan investor sehingga membuat harga saham juga pasti meningkat. Dalam hal ini dapat diprediksi bahwa semakin baik praktik *corporate governance* yang diterapkan oleh suatu perusahaan semakin tinggi nilai perusahaan. *good corporate governance* berpengaruh pada nilai perusahaan dibuktikan dalam studi empiris yang dilakukan oleh (Nila & Suryanawa, 2018) serta (Retno & Priantinah, 2012). Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik mencerminkan bahwa manajer mampu dalam mengelola perusahaan dengan baik, sehingga investor pasti yakin dalam menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut, yang selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan (Susilawati, 2019).

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial pada Nilai Perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari pihak manajemen yang memiliki hak secara aktif yang ikut melakukan pengambilan keputusan perusahaan. Dengan adanya kepemilikan manajemen muncul dugaan menarik “meningkatnya nilai perusahaan

itu akibat dari kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan lebih efektif dalam *memonitoring* aktivitas dari perusahaan” (Aldino, 2015).

Adanya kepemilikan manajerial berhasil mengurangi masalah dari keagenan manajer dengan menyelaraskan kepentingan - kepentingan manajer dan pemegang saham. kepentingan manajer dan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak mampu melakukan manipulasi laba untuk kepentingan pribadi (Jensen dan Meckling, 1976). Dengan adanya kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, karena manajemen juga merasa memiliki perusahaan. Dari meningkatnya kinerja perusahaan akan berbanding lurus dengan meningkatnya nilai perusahaan (Sujono & Soebiantoro, 2007).

Semakin besar proporsi dari kepemilikan manajemen maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan (Yuniasih & Wirakusuma, 2009). Dibangunnya hubungan yang signifikan dan juga positif antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Dalam penelitian lain juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Christiawan & Tarigan, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

H₁ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif pada nilai perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan beberapa dari saham perusahaan yang dimiliki oleh external perusahaan, bisa lembaga lain, perusahaan lain atau juga pemerintah.

Dalam penelitian terdahulu telah menyatakan bahwa hasilnya ialah ‘kepemilikan institusional berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan” (RACHMAWATI & TRIATMOKO, 2007). Begitu pula dengan penelitian lain yang

menyatakan hal yang sama bahwa “kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan” (Sri Oktaryani et al., 2018).

Ada pula penelitian di Selandia Baru menyatakan bahwa “peningkatan jumlah kepemilikan institusional dapat memcerminkan dan mempromosikan kinerja perusahaan yang kuat” (SLOVIN & SUSHKA, 1993). Hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan meningkat jika dalam pemilik institusi dapat menjadi alat *monitoring* dengan cukup efektif (Andika & Rahman, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan.

Komite audit ditunjuk dan juga diutus oleh dewan komisaris perusahaan yang tugasnya bertanggung jawab untuk membantu tugas dari auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi pada PT. Bursa Efek Indonesia atau lebih kerap di sebut BEI (pada No. Kep-315/BEJ/06-2000) yang membahas tentang pembentukan komite audit yang disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan yang tercatat dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris”.

Dalam menjalankan tugas pengawasannya Dewan Komisaris yang dibantu oleh para komite yang telah dipilih dan diangkat salah satunya Komite Audit. Komite Audit adalah usaha perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara dipantau dari pengelolaan manajemen perusahaan. komite audit berperan sebagai penghubung antara manajemen perusahaan, dewan komisaris dan pihak eksternal lainnya (Onasis, 2017). Tugas pokok Komite Audit yaitu melakukan fungsi pengawasan internal perusahaan, memantau laporan keuangan, dan lebih meningkatkan keefektifan dari audit. hal ini bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun dengan proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektivitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan

keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi. (Poluan & Wicaksono, 2019).

Dalam hal ini jika kualitas dan karakteristik komite audit telah tercapai, transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, yang mengakibatkan meningkatnya kepercayaan dari para pelaku pasar modal. Tanggung jawab lain dari komite audit ialah melindungi kepentingan pemegang saham yang minoritas.

Investor menganggap komite audit dapat memberikan kontribusi pada kualitas pelaporan keuangan. Hal ini terbukti dari beberapa yang menyatakan “komite audit positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan”. Hal di atas ini telah dinyatakan oleh (McMullen, 1996) dalam (Siallagan & Machfoedz, 2006).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

H3 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan.

Hal yang diperhatikan dalam dewan komisaris independen adalah jumlah dari dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jika dalam sebuah perusahaan jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak maka menandakan fungsi dari pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang meningkat atau semakin baik. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* atau yang sering di singkat GCG. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas dalam untuk menjamin dalam hal strategi perusahaan, melakukan pengawasan pada manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan dilaksanakannya akuntabilitas. Tanggung jawab dewan komisaris untuk mengawasi bagian manajemen yang tugasnya meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka pusatnya ketahanan dan kesuksesan perusahaan bergantung pada kinerja dari dewan komisaris perusahaan (Bonny, 2005). Tugas lain dari dewan komisaris ialah memantau

efektivitas praktik *corporate governance* yang diterapkan perseroan, jika diperlukan juga melakukan penyesuaian (Lastanti & Salim, 2019).

komisaris independent dituntut untuk meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *good corporate governance* di dalam perusahaan. Manfaat *corporate governance* akan dilihat dari premium yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika ternyata investor bersedia membayar lebih mahal dan menginginkan yang lebih baik, maka harga dari nilai pasar perusahaan yang sudah menerapkan *good corporate governance* juga akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang belum menerapkan atau mengungkapkan praktek *good corporate governance* (RACHMAWATI & TRIATMOKO, 2007).

Sedangkan menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/pada tahun 2009 dalam komisaris independen anggotanya tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham juga hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dan anggota dewan komisaris juga anggota direksi. Komisaris independen juga tidak boleh memiliki hubungan keuangan dan hubungan kepemilikan saham dengan bank sehingga dapat mendukung kemampuannya dalam bersikap independen. Dan tugasnya untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas - tugasnya agar lebih efektif.

Didasarkan pada pemikiran bahwa semakin tinggi komisaris independen dalam perusahaan, maka diharapkan pemberdayaan dewan komisaris ini dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah pada perusahaan (Susanto & Carningsih, 2013). Pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan adalah positif signifikan. Hal itu terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Siallagan & Machfoedz, 2006) dan dalam penelitian lainnya juga membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan (Kawatu, 2009).

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu hubungan atau kaitan yang mencerminkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya dari penelitian yang sedang diteliti. Kerangka piker dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat diketahui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor - faktor yang mempengaruhi pada nilai perusahaan. Variabel yang diduga bisa menjadi factor pada variabel *good corporate governance*. Pengujian dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Hipotesis tersebut didasarkan pada konsep dari setiap variable yang ada. Kemudian, secara harfiah peneliti mengaitkan variabel bebas yang diduga dapat mendeteksi

variabel terkait dengan mengacu pada teori yang relevan. Untuk dapat menganalisis model diatas, maka alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

